

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Pers, 2015
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015;
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, Cet II;
- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persektif Hukum dan Masyarakat*, PT Rafika Aditama, 2005
- Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan*, FH UNDIP, 1993;
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and Staate*, Russell dan Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan 1, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006;
- Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Ithaca and London; Cornell, dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Pers, 2015;
- Jimly Asshiddiqie. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi. Refleksi satu tahun Mahkamah Konstitusi*.Konstitusi press. Jakarta. 2004;
- Jimly_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006;
- Jimly_____, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, SinarGrafika. 2010;
- Jurnal Konstitusi*, PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981;

- Kuncoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1999;
- Lihat buku KHN, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi serta Permasalahan Aktual Di Bidang Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI. Jakarta, 2011;
- Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010;
- Muhammad Ridwan Indra, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet I, 1987;
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Cet 1, UI Press, Jakarta, 1995;
- Muhammad _____, *Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, PT. Bulan Bintang, Cet 1, Jakarta, 1992;
- Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh Ham (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*, Setara Press, Malang, 2005;
- Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, 2011;
- Ni'matul _____, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,;
- Ni'matul _____. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press. Yogyakarta. 2014;
- Nimatul _____, *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016;
- Oemar seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980;
- Rosyidi Ranga Wijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998;
- Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016;
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989;
- Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Magnum Pustaka Utama, Cet I, 2015;
- Supporting Material Dasar-Dasar HAM, Bahan Pendidikan Dasar-Dasar HAM Sebagai Syarat Sertifikasi matakuliah Dasar-Dasar HAM*, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, 2002

Titik Triwulan titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945;

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 20/PUU-XIV/2016

Data Elektronik

Sumber, Merdeka.com, Versi Cetak Harian Tempo edisi 16 Maret 2016, di halaman 11 dengan judul "Penyadapan dalam Revisi UU KPK".
<http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-revisi-uu-kpk>, diambil tanggal 23 desember 2016, 20:30.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/10050865/Ini.Aturan.Penyadapan.di.KPK.Versi.DPR>, diambil pada 23 desember 2016, 20:31 WIB

<http://www.hukumpedia.com/hukum-unpad/penyadapan-kunci-utama-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-membongkar-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada pukul 13.45, 14 Februari 2017